

## **Analisis Pengaruh Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja Non Modal dan Pelampauan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada APBD Kota Payakumbuh**

**Penulis:**  
Rahmawati<sup>1)</sup>  
Anne Putri<sup>2)</sup>

**Afiliasi:**  
Magister Manajemen  
Institut Teknologi dan  
Bisnis Haji Agus  
Salim Bukittinggi<sup>1,2)</sup>

**Korespondensi:**  
rahmawati.300787@g  
mail.com

**Histori Naskah:**  
Submit: 24-07-2023  
Accepted: 10-08-2023  
Published: 18-08-2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sisa belanja modal, sisa belanja non modal dan pelampauan PAD terhadap peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Kota Payakumbuh. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan dari dua belas Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) pada Kota Payakumbuh yang mengelola PAD. Jenis penelitian yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dengan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa belanja modal, belanja non modal dan pelampauan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

**Kata kunci:** Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja Non Modal, Pelampauan PAD, SiLPA.

---

### **PENDAHULUAN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud kristalisasi aspirasi daerah yang disusun secara terencana oleh pemerintah daerah setelah memperhatikan aspirasi kebutuhan riil masyarakat melalui DPRD yang berorientasi kepada kepentingan publik. APBD yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan, harus dapat dikelola dan diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD yang baik dan benar maka diperlukan landasan administrative dalam pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud kristalisasi aspirasi daerah yang disusun secara terencana oleh pemerintah daerah setelah memperhatikan aspirasi kebutuhan riil masyarakat melalui DPRD yang berorientasi kepada kepentingan publik. APBD yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan, harus dapat dikelola dan diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD yang baik dan benar maka diperlukan landasan administrative dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penyusunan APBD jumlah SiLPA seharusnya adalah sebesar nol dimana hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan dapat menutup defisit yang terjadi. Besaran nilai SiLPA dapat berarti positif maupun negatif. Indikasi SiLPA yang positif berasal dari efisiensi dan efektifitas anggaran sehingga mampu menghasilkan sisa dana bersih, namun SiLPA yang negatif merupakan sisa dari penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien. SiLPA yang negatif dapat disebabkan oleh ketidakcermatan dalam penyusunan anggaran dan lemah dalam pelaksanaan anggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, SiLPA ini perlu dihindari karena pada dasarnya SiLPA merupakan dana

yang menganggur (idle fund), apabila tidak dimanfaatkan secara cermat, tidak akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah (Yulia Rani, 2019).

SiLPA Kota Payakumbuh sejak tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan. Perbedaan antara anggaran dan realisasi APBD memiliki pola yang cenderung sama. Dampak yang muncul dari perbedaan antara anggaran dan realisasi yang dicapai inilah yang kemudian memunculkan adanya SiLPA. Besarannya SiLPA ini tidak dapat diprediksi pada awal tahun anggaran. Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya nilai SiLPA Kota Payakumbuh pada tahun 2022 adalah pelampauan dari sisi pendapatan daerah. Dimana realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tercapai sebesar 116,57 persen.

Dengan kondisi SiLPA Kota Payakumbuh yang berfluktuatif tersebut menjadi fenomena tersendiri. Indikasi SiLPA yang besar menunjukkan bahwa kondisi yang tidak baik. Kondisi SiLPA yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan rendahnya komitmen dan profesionalisme aparatur pelaksana anggaran publik (Kumorotomo, 2011). Namun adanya SiLPA yang muncul pada laporan keuangan suatu pemerintah daerah menjadi dilema tersendiri bagi pengelola keuangan daerah. Dengan demikian Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh sisa belanja modal, sisa belanja non modal dan pelampauan pendapatan asli daerah terhadap kenaikan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada Kota Payakumbuh.

## Studi Literatur

### Definisi dan Struktur APBD

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD ini menjadi dasar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam waktu satu tahun anggaran. Adapun struktur APBD terdiri dari Pendapatan daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

APBD ini menjadi dasar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam waktu satu tahun anggaran. APBD dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran (Mardiasmo, 2009). Proses penyusunan anggaran bertujuan guna memudahkan pemerintah dalam merealisasikan tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, menciptakan efisiensi dan keadilan, memenuhi prioritas belanja, serta meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian, yaitu : “Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.”

### Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Dalam undang-undang diatur bahwa batas minimal belanja modal minimal dalam suatu daerah pada periode satu tahun anggaran adalah sebesar 40% dari APBD.

### **Belanja Non Modal**

Secara nasional komposisi belanja daerah dalam APBD secara nasional dibagi ke dalam 4 (empat) bagian utama yaitu Belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Selain belanja modal, ketiga jenis belanja lainnya dapat dikelompok sebagai belanja non modal.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Dalam buku Pengelolaan Keuangan Daerah (Abdul Halim dan Muhammad Iqbal, 2012) salah satu persoalan dalam manajemen pendapatan adalah kebijakan penyeragaman sumber pendapatan. Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup sumber – sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah.

### **Konsep Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**

Menurut (Mahmudi, 2009) SiLPA merupakan sisa anggaran dan merupakan selisih antara rencana pendapatan dan rencana pengeluaran pada akhir tahun anggaran yang tersaji pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang selanjutnya SiLPA juga digunakan sebagai sisa awal kas pada anggaran berikutnya.

SiLPA dapat menjadi salah satu sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pada tahun berjalan, akan tetapi jumlah dari sisa anggaran ini belum pasti karena dalam penetapan anggaran untuk tahun sekarang belum ada pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, sehingga penetapan jumlah SiLPA ini masih dalam bentuk taksiran atau belum sesuai dengan berapa yang sesungguhnya dicantumkan (Abdullah & Rona, 2014). SiLPA adalah suatu indikator yang dapat menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Kusnandar dan Dodik Siswanto, 2012).

### **Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). SiLPA dapat diketahui jumlahnya pada akhir tahun anggaran tepatnya pada tanggal 31 Desember. Untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD, maka salah satu alat analisis SiLPA dapat menggunakan dengan rasio pertumbuhan (growth ratio). Rasio pertumbuhan (growth ratio) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah diperoleh dari periode ke periode berikutnya. Prestasi tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena merupakan salah satu indikasi untuk menilai kinerja pemerintah daerah (Halim, 2007).

Secara umum, apabila komponen rasio pendapatan untuk semakin naik atau semakin besar, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah yang semakin baik pula. Berbeda apabila pos belanja atau pengeluaran memiliki rasio yang semakin naik atau besar maka hal ini menunjukkan

bahwa kinerja pemerintah daerah yang buruk, ini disebabkan jika pengelolaan keuangan daerah tidak sanggup untuk menjaga efisiensi anggaran.

Rasio ini dihitung dengan mengurangi kondisi tahun atau periode sekarang dengan kondisi tahun/periode lalu dan hasilnya dibandingkan dengan kondisi tahun/periode yang lalu atau dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{SILPA Tahun Tertentu} - \text{SILPA Tahun Sebelumnya} \times 100\%}{\text{SILPA Tahun Sebelumnya}}$$

Secara matematis merumuskan sebagai berikut (Sulaiman et al., 2017):

$$r = \frac{Pt}{Po} \times 100\%,$$

Dimana:

R = Pertumbuhan

Pt = SILPA Tahun Tertentu

Po = SILPA Tahun Sebelumnya

## Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sisa belanja modal, sisa belanja non modal dan pelampauan pendapatan asli daerah terhadap peningkatan nilai SiLPA pada Kota Payakumbuh. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada pemerintah Kota Payakumbuh yaitu sebanyak 12 SKPD pada tahun 2018 - 2022. Pemilihan sample ini didasarkan pada SKPD yang memiliki Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah awal penelitian menggunakan alat bantu analisis statistik deskriptif sebagai dasar awal penelitian. Dengan demikian analisa diawali dengan melihat kecenderungan keterkaitan pada fenomena pengamatan. Selanjutnya pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data pendukung lainnya. Analisa lebih lanjut dilakukan dengan melihat kecenderungan hubungan antar fenomena yang dilakukan dengan menggunakan analisa statistik.

Dalam penelitian ini perhitungan statistik menggunakan Model Analisis Regresi dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + e$$

Keterangan :

Y : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

a : Konstanta (Intercept)

X1 : Belanja Modal

X2 : Belanja Non Modal

X3 : Pelampauan Pendapatan

b1,b2,b3 : Koefisien regresi

e : Error Term

## Hasil dan Pembahasan

### A. Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah variabel terikat dan variabel terdistribusi normal atau tidak dalam model regresi. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas**

No.	Variabel	Asymp. Sig	Nilai Batas	Keterangan
1	<i>Standardized Residual</i>	0,077	0,05	Normal

**Sumber:** Hasil Pengolahan data, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig nya adalah 0,077 dimana hal ini berarti bahwa data penelitian telah terdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05.

#### 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Cara menentukan ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance < 0,10 atau nilai VIF > 10 maka terdapat multikolonieritas, jika nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas ini dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2. Uji Multikolinearitas**

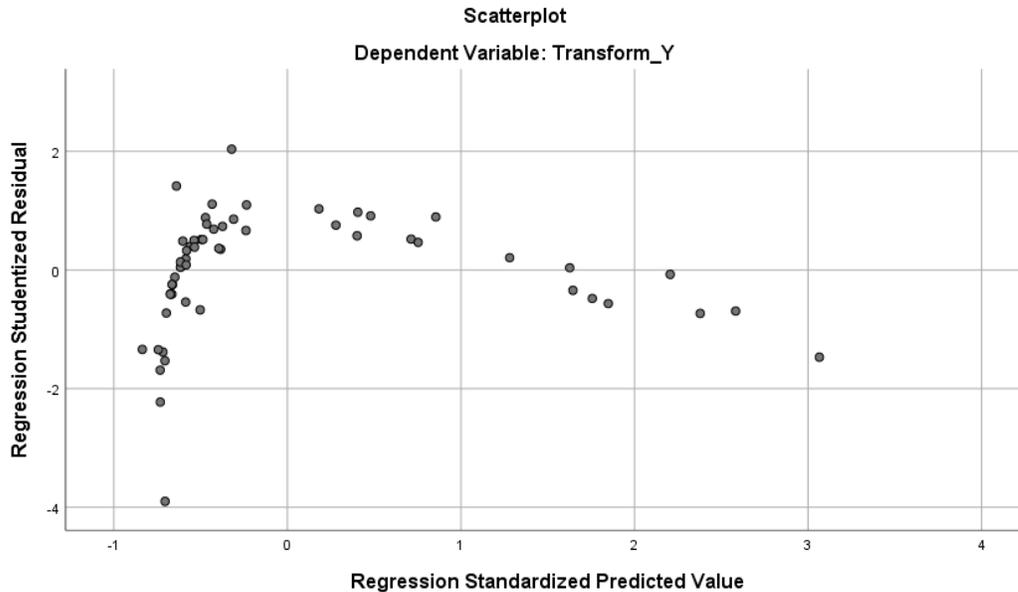
No.	Variabel bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Sisa Belanja Modal	0,944	1,060	Bebas Multikolonieritas
2	Sisa Belanja Non Modal	0,935	1,070	Bebas Multikolonieritas
3	Pelampauan Pendapatan Asli Daerah	0,990	1,010	Bebas Multikolonieritas

**Sumber:** Hasil Pengolahan data, 2023

Dari tabel 2. dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu sisa belanja modal ( $X_1$ ), sisa belanja non modal ( $X_2$ ), dan pelampauan pendapatan asli daerah ( $X_3$ ) dinyatakan bebas dari multikolonieritas karena kedua variabel bebas tersebut mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10.

### 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada grafik scatterplot, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, jika hal ini terpenuhi maka tidak terdapat heteroskedastisitas sehingga model regresi adapat digunakan dalam penelitian. Berikut grafik scatterplot hasil uji heteroskedastisitas :



Gambar 1. Hasil Uji HeterokedastisitasMetode Scatterplot  
**Sumber:** Hasil Pengolahan data, 2023

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara residual tidak homogen. Penyebaran plot dengan pola tidak tertentu dan menyebar secara acak dapat disimpulkan jika persamaan regresi memenuhi asumsi non heteroskedastisitas.

### 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011). Penelitian ini menggunakan pengujian Durbin-Watson untuk melihat ada tidaknya gejala autokorelasi. Berikut tabel hasil uji autokorelasi.

**Tabel 3. Hasil Uji Korelasi**

Model Summary <sup>b</sup>										
Mo del	R	R Squar e	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.834 <sup>a</sup>	.695	.678	.82204	.695	40.305	3	53	.000	1.973

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi di atas, nilai DW (Durbin Watson) sebesar 1,973. Hal ini menunjukkan bahwa nilai DW berada antara -2 sampai dengan +2 sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi autokorelasi pada masing-masing variabel yang diteliti.

### B. Hasil Analisis Regresi

Untuk melihat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen maka dilakukan pengujian analisis regresi dengan menggunakan program SPSS 26.0. Berikut hasil uji regresi pada penelitian ini:

**Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda**

Variabel	Koef. Regresi	t hitung	Sig.
Konstanta	20,396		
X <sub>1</sub>	3.037E-10	5,852	0,000
X <sub>2</sub>	1.852E-10	6.519	0,000
X <sub>3</sub>	1.222E-10	3,830	0,000
F hitung = 40,305	Sig. 0,000		
R <sup>2</sup> = 0,695			

**Sumber:** Data Sekunder, Diolah penulis, 2023

Dari hasil regresi diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 20,396 + 0,0000003037 X_1 + 0,0000001852 X_2 + 0,0000001222 X_3 + e$$

Dari persamaan diatas menunjukkan bahwa variabel independen yang dianalisa memberikan pengaruh terhadap variabel dependen yaitu :

1. Nilai constanta sebesar 20,396 menunjukkan bahwa sebelum adanya variabel independen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah sebesar 20,396
2. Sisa Belanja modal (X<sub>1</sub>) dengan nilai koefisien regresi 0,0000003037 berarti bahwa terjadi pengaruh yang positif antara Belanja Modal dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar 0,0000003037 satuan pada Kota Payakumbuh.
3. Sisa Belanja Non Modal (X<sub>2</sub>) dengan nilai koefisien regresi 0,0000001852 berarti bahwa terjadi pengaruh yang positif antara Sisa Belanja Non Modal dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dimana hal ini berarti setiap penambahan Belanja Non Modal 1 satuan akan mengakibatkan terjadinya penambahan SiLPA sebesar 0,0000001852 satuan pada Kota Payakumbuh.
4. Pelampauan PAD (X<sub>3</sub>) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,0000001222 juga menunjukkan bahwa terjadi pengaruh yang positif antara Pelampauan PAD dengan SiLPA.

### C. Uji Hipotesis

#### 1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel independen mempengaruhi dan dapat menjelaskan variabel dependennya. Analisis koefisien determinasi untuk sisa belanja modal, sisa belanja non modal dan pelampauan pendapatan asli daerah terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dilakukan dengan menggunakan program SPSS dengan bentuk output SPSS seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. Hasil R Square**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.834 <sup>a</sup>	.695	.678	.82204

a. Predictors: (Constant), Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja Non Modal, Pelampauan PAD

b. Dependent Variable: SiLPA

**Sumber:** Hasil Pengolahan data, 2023

Berdasarkan tabel hasil perhitungan estimasi regresi diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi yang disesuaikan atau R Square yaitu 0,695 artinya 69,5% variasi dari semua variabel bebas (sisa belanja modal, sisa belanja non modal dan PAD) dapat menerangkan variabel tak bebas (SiLPA). Artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 69,5%, sedangkan sisanya sebesar 30,5% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 2. Uji F (Uji Signifinkansi Simultan)

**Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	81,708	3	27,236	40,305	,000 <sup>b</sup>
	Residul	35,815	53	,676		
	Total	117,523	56			

a. Dependent Variable: SiLPA

b. Predictors: (Constant), Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja Non Modal, Pelampauan PAD

**Sumber:** Hasil Pengolahan data, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Untuk nilai  $F_{hitung}$  sebesar 40,305 dan kemudian dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$  2,769, dimana  $F_{hitung} > F_{tabel}$ . Jadi dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja Non Modal dan Pelampauan PAD secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

### 3. Uji t (Uji Signifikansi Parameter Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel yaitu bila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  berarti bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh bermakna terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, dalam hal ini tingkat kepercayaan  $\alpha$  sebesar 0,05 (5%).

**Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi T (Parsial)**

Coefficients <sup>a</sup>											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	20.396	.139		146.455	.000					
	SISA BELANJA MODAL (X1)	3.037E-10	.000	.457	5.852	.000	.578	.626	.444	.944	1.060
	SISA BELANJA NON MODAL (X2)	1.852E-10	.000	.511	6.519	.000	.648	.667	.494	.935	1.070
	PELAMPAUAN PAD (X3)	1.222E-10	.000	.292	3.830	.000	.342	.466	.290	.990	1.010

a. Dependent Variable: SiLPA (Y)

**Sumber:** Hasil Pengolahan data, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai signifikansi diperoleh nilai masing-masing variabel independen yaitu sisa belanja modal, sisa belanja non modal dan pelampauan pendapatan daerah sebesar 0,000 untuk seluruh variabel. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari sisa belanja modal, sisa belanja non modal dan pelampauan pendapatan daerah terhadap SiLPA, terlihat dari nilai signifikannya lebih rendah dari  $\alpha = 0,05$

## Pembahasan

### **Pengaruh Sisa Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan SiLPA pada APBD Kota Payakumbuh Tahun 2018 – 2022**

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa sisa belanja modal memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap SiLPA. Dimana hasil uji hipotesis pada variabel ini memiliki nilai probabilitas  $t$  sebesar 0,000 atau 0% kecil dari batas standar deviasi (tingkat kesalahan) 5%. Dari nilai  $t$  juga didapat hasil  $t_{hitung}$  5,852 dan  $t_{tabel}$  1,674. Nilai signifikansi 0,000  $< \alpha$  0,05 dan  $t_{hitung}$  5,852  $>$   $t_{tabel}$  1,674, maka dapat dijelaskan bahwa hipotesis (H1) dapat diterima. Ini berarti bahwa peningkatan sisa belanja modal akan menyebabkan peningkatan SiLPA pada Kota Payakumbuh. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (KAMELIA, 2017) tentang Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi SiLPA dan Strategi untuk Meminimalisirnya pada APBD Kabupaten Bogor bahwa variabel sisa belanja modal pada penelitian tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap adanya SiLPA di Kabupaten Bogor dengan nilai koefisien 0,971.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi (PKM, 2013). Semakin besar belanja modal yang terealisasi maka akan semakin kecil adanya sisa belanja modal yang akan menjadi SiLPA pada akhir tahun anggaran. Namun begitu juga sebaliknya, jika semakin kecil belanja modal yang terealisasi maka sisa anggaran yang berasal dari belanja modal akan semakin besar dan mengakibatkan meningkatnya jumlah SiLPA.

### **Pengaruh Sisa Belanja Non Modal Terhadap Pertumbuhan SiLPA pada APBD Kota Payakumbuh Tahun 2018 – 2022**

Hasil hipotesa kedua yaitu adanya hubungan positif signifikan yang terjadi antara sisa belanja non modal dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel sisa belanja non modal adalah 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dan dilihat dari  $t_{hitung}$  sebesar 6,519 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,674. Dengan demikian hipotesis kedua ini juga dapat diterima. Hal ini juga didukung oleh penelitian (Usman, 2012) tentang Analisis Proses dan Pola Terbentuknya SiLPA di Kabupaten Sumbawa yang menyebutkan bahwa sisi regulasi yaitu berupa ketentuan akses gaji sebesar 12,5% akan meningkatkan adanya SiLPA.

Pada Kota Payakumbuh, sisa Belanja Non Modal menjadi faktor penyumbang terbesar bagi SiLPA. Perencanaan yang kurang tepat sasaran menjadi salah satu penyebab realisasi belanja non modal tidak tercapai 100%.

### **Pengaruh Pelampauan Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan SiLPA pada APBD Kota Payakumbuh Tahun 2018 – 2022**

Hasil uji hipotesa ke tiga dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan dan positif antara pelampauan pendapatan asli daerah dengan SiLPA pada Kota Payakumbuh. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelampauan pendapatan asli daerah mempengaruhi adanya SiLPA, dengan demikian hipotesa tersebut dapat diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang didapat yaitu 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai  $t_{hitung}$  yang didapat untuk variabel pelampauan PAD adalah 3,830 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,674.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bali, 2013) yang menyebutkan bahwa keberadaan SiLPA diduga karena beberapa faktor seperti adanya pelampauan pendapatan daerah yang tidak terhitung dalam perhitungan anggaran. Selain itu (Yulia Rani, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Kinerja Keuangan Daerah Studi pada 38 Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur Tahun 2012-2016 menerangkan bahwa pelampauan pendapatan daerah mempengaruhi adanya SiLPA dengan penjelasan semakin besarnya pelampauan pendapatan daerah yang dicapai oleh pemerintah daerah akan menyebabkan peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Kabupaten Kota di Jawa Timur.

Adanya hubungan positif antara pelampauan pendapatan daerah dengan SiLPA hendaknya harus diantisipasi. Karena apabila dibiarkan maka akan meningkatkan nilai SiLPA dimana hal tersebut dianggap tidak baik pada pelaksanaan keuangan daerah. Harus adanya hubungan yang sinkron dan saling terkait antara perencanaan dan realisasi anggaran. Perencanaan target PAD yang tidak tepat dibawah potensi daerah yang ada atau under estimate akan menyebabkan selisih lebih pada realisasi pencapaian target pendapatan sehingga akan terakumulasi menjadi SiLPA.

Dalam penetapan target pendapatan, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) cenderung melakukan penerapan penganggaran secara partisipatif. Pendekatan partisipatif berpotensi menimbulkan slack anggaran (Falikhatun, 2007). Slack anggaran merupakan kegiatan penganggaran yang ditemukan adanya distorsi secara sengaja dengan menurunkan target pendapatan serta menaikkan biaya yang dikeluarkan sehingga target anggaran dapat dengan mudah dicapai (Suartana, 2010).

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Sisa belanja modal Variabel Sisa Belanja Modal ( $X_1$ ) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Payakumbuh kemudian Sisa Belanja Non Modal ( $X_2$ ) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Payakumbuh. Terakhir Pelampauan Pendapatan Daerah ( $X_3$ ) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2018 – 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah (Edisi Keti)*. UPP STIM YKPN.
- Abdullah, S., & Rona, R. (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. *Iqtishadia* <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1106>.
- Bali, T. T. (2013). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2010 Ditinjau Dari Aspek Manajemen Keuangan Daerah (Studi Pada .... [etd.repository.ugm.ac.id](http://etd.repository.ugm.ac.id). <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/59350>.
- BPK. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1–73. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>.
- Falikhatun. (2007). Interaksi Informasi Asimetri, Budaya Organisasi, dan Group Cohesiveness Dalam Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran dan Budgetary Slack (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Se-Jawa Tengah. Makalah Simposium Nasional Akuntansi X.

- Halim, H. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (3rd ed.). Salemba Jakarta.
- Indonesia, M. K. R. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. In Menteri Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Kumorotomo, W. (2011). Akuntabilitas Anggaran Publik: Isu Politik, Prioritas Belanja, dan SILPA dalam Alokasi APBD di Beberapa Daerah. *Journal JIANMaP*, 1(1), 1–22.
- Kusnandar dan Dodik Siswantoro. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Dan Prosiding SNA*, 15(1), 1–20.
- Mahmudi. (2009). Manajemen Keuangan Daerah (Erlangga).
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset.
- Mely Kamelia. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dan Strategi Untuk Meminimalisirnya Pada Apbd Kabupaten Bogor. Intitut Pertanian Bogor.
- Suartana, I. W. (2010). Akuntansi Keprilakuan. ANDI.
- Sulaiman, M., Munirwansyah, M., & Azmeri, A. (2017). Analisis Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Ditinjau Dari Waktu Pelaksanaan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Teknik Sipil*. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/JTS/article/view/9959>.
- Usman. (2012). Analisis Proses dan Pola Terbentuknya SiLPA di Kabupaten Sumbawa. Universitas Brawijaya Malang.
- Yulia Rani. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dan Kinerja Keuangan Daerah (Studi Pada 38 Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur Tahun 2012-2016. Universitas Brawijaya.